



➤ **AM Zdavir Sapada,**
Pemeriksa Ahli Pertama BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

Kegagalan kebijakan pembangunan kadang (atau bahkan seringkali) diakibatkan oleh sasaran pembangunan yang keliru (walau telah menetapkan tujuan yang benar, sasaran sebagai indikator pencapaian tujuan seringkali keliru). Hal ini terjadi akibat orientasi pembangunan yang hanya “mengejar” angka pertumbuhan (*growth-oriented development*) dan gagal melihat tujuan dari pembangunan itu sendiri, yaitu manusia. Walhasil, hal ini membuat para pengampu (dalam hal ini pemerintah) harus memutar haluan dengan menumpukan pertumbuhan berbasis manusia (*human-oriented development*). Hal ini bukannya menegaskan peran pertumbuhan ekonomi itu sendiri, namun, dengan menekankan dimensi manusia pada pembangunan, ia seakan-akan hendak mengembalikan arah tujuan pembangunan pada manusia dan kesejahteraannya.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berbasis manusia, maka tentu kualitas hidup manusia juga perlu diperhatikan. Hal ini, juga selaras dan beririsan dengan sejumlah tujuan *Sustainable Development Goals* (khususnya poin “Tanpa Kemiskinan,” “Tanpa Kelaparan,” serta “Kehidupan sehat dan sejahtera”). Namun demikian, kemajuan tersebut terancam akibat tingginya peristiwa *stunting* pada bayi lima tahun (balita) pada tahun 2010 yang mencapai 35,6 persen (Riskesdas: 2013). Hal ini berpotensi menjadi ancaman dan menghambat kemajuan ekonomi mengingat balita merupakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia di waktu yang akan datang sehingga patut menjadi perhatian untuk segera ditangani. Maka, peralihan dasar pembangunan dari basis ekonomi ke dimensi manusia juga diperlukan dan perlu dilakukan dengan menangani angka *stunting* demi menyelamatkan SDM Indonesia, menjamin pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan (Penanganan) *Stunting* di Indonesia

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan sehingga berpotensi menghambat dan mengganggu tumbuh-kembang anak baik secara fisik dan kognitif (Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan UNICEF). Peristiwa *stunting* ini disebut-sebut berpotensi terjadi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) anak, yang jika gagal ditangani, dapat mengganggu potensi SDM Indonesia.

Dalam perjalanannya, tampaknya, penanganan *stunting* memperlihatkan perkembangan yang cukup menggembirakan pada skala nasional. Hal ini terlihat dari menurunnya angka *stunting* yang pada tahun 2018 mencapai 30,8 persen menjadi 21,6 persen pada tahun 2022 (Survei Status Gizi Indonesia/SSGI: 2022). Penurunan sebesar 9,2 persen poin ini mungkin dapat dijelaskan oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil yang pada tahun 2018 bertumbuh 5,17 persen dan pada tahun 2022 bertumbuh 5,53 persen (BPS). Karena besarnya perhatian pemerintah terhadap *stunting* melalui hadirnya berbagai program, tak heran, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) juga turut mengevaluasi program tersebut melalui laporan pemeriksaan.

Namun demikian, sayangnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Prov. Sultra) belum mampu mengikuti kinerja yang pesat dari berbagai provinsi lainnya. Hal ini terlihat dari data yang disajikan SSGI, dimana jumlah *stunting* di Sultra yang pada tahun 2018 mencapai 28,7 persen, hanya menurun 1 persen poin pada tahun 2022 menjadi 27,7 persen (op.cit). Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional dan membuat peringkat *stunting* Sultra melonjak dari peringkat 22 pada tahun 2018 menjadi peringkat 9 tertinggi nasional pada tahun 2022. Lebih jauh, kinerja pemerintah daerah dan komitmen terhadap penurunan angka *stunting* patut dipertanyakan, mengingat hanya terjadi penurunan sebesar 1 persen poin dalam lima tahun terakhir.

Indikator *Stunting* dan Faktor-Faktor Perkembangan *Stunting*

Untuk menangani hal ini, karenanya, diperlukan pemetaan terkait akar masalah mengapa Prov. Sultra tak kunjung mampu mengimbangi kinerja *stunting* provinsi lain. Dalam menjelaskan kinerja *stunting* Provinsi Sulawesi Tenggara, Laporan Indeks Khusus Penanganan *Stunting*/IKPS (BPS: 2021) mungkin dapat memberikan *insight* terkait akar masalah tersebut. Laporan IKPS menyajikan data terkait bagaimana kemajuan penanganan *stunting* yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah provinsi.

IKPS sendiri merupakan indeks gabungan (*composite index*) yang terdiri dari sejumlah indeks: Indeks Kesehatan, Indeks Gizi, Indeks Perumahan, Indeks Pangan, Indeks Pendidikan, dan Perlindungan Sosial. Lebih mendalam lagi, masing-masing indeks ini juga terdiri dari sejumlah indikator (istilah yang digunakan Kemenkes adalah dimensi). Indikator Kesehatan misalnya, terdiri dari indikator imunisasi, penolong persalinan oleh nakes di faskes, dan KB modern; indikator perlindungan sosial terdiri dari Kepemilikan JKN/Jaminan Kesehatan Nasional dan Penerima KPS/Kartu Perlindungan Sosial.

Dalam laporan ini, disebutkan bahwa IKPS Sultra hanya meningkat 3,9 persen dari tahun 2018 ke tahun 2021, dibanding peningkatan yang dialami seluruh provinsi lainnya sebesar 7,69 persen pada rentang tahun yang sama. Lambatnya kinerja IKPS Provinsi Sultra ini mungkin dapat menjelaskan akan rendahnya kinerja *stunting* Sultra. Jika ditilik secara lebih mendalam, terjadi penurunan tajam pada dua indikator di Sulawesi Tenggara yang mungkin menjadi penghambat atas kemajuan penanganan *stunting*, dua indikator tersebut adalah "Ketidakcukupan konsumsi pangan" (menurun sebesar 6,8 persen) dan "Penerima KPS" (menurun 26,5 persen poin).

"Jika ditilik secara lebih mendalam, terjadi penurunan tajam pada dua indikator di Sulawesi Tenggara yang mungkin menjadi penghambat atas kemajuan penanganan *stunting*, dua indikator tersebut adalah "Ketidakcukupan konsumsi pangan" (menurun sebesar 6,8 persen) dan "Penerima KPS" (menurun 26,5 persen poin)."

Dalam penjelasannya, Indeks "Ketidakcukupan konsumsi pangan" merupakan kondisi persentase penduduk dengan konsumsi makanan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minimum energi untuk hidup sehat dan aktif sesuai umur, jenis kelamin, dan kondisi fisiknya. Lebih jauh, faktor yang mempengaruhi indikator ini mencakup kemiskinan, daya beli rumah tangga, pengetahuan gizi, ketersediaan pangan, pendapatan, dan sejumlah hal lainnya. Berbagai faktor ini diduga turut mempengaruhi atas ketidakcukupan konsumsi pangan, yang juga dapat dijelaskan pada Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) Sultra pada tahun 2018 yang mencapai 135,353, menurun menjadi 106,425 pada tahun 2021 (BPS Sultra: 2023). Sementara itu, penjelasan logis terkait penerima KPS yang menurun tajam sebesar 26,5 persen poin adalah kian meningkatnya jumlah penduduk di tengah krisis Covid dan pasca Covid yang tidak mampu dijangkau melalui peningkatan KPS baik akibat tidak adanya peningkatan jumlah KPS maupun salah salur). Hal ini diperkuat oleh berbagai temuan audit BPK-RI PWK Sultra yang menunjukkan berbagai bantuan KPS yang salah salur di berbagai kabupaten (yang pada skala nasional angka salah salur disebut mencapai Rp185 miliar [CNN]).

Bagaimana Intervensi Pemerintah dalam Menangani Masalah Ini (Dilema, Hambatan, dan Peluang)?

Dalam Upaya menurunkan angka *stunting*, Pemerintah menetapkan *stunting* sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4 persen pada 2021 menjadi 14 persen pada 2024. Selain itu, untuk menekan angka *stunting*, maka pemerintah berupaya "memerangi" *stunting* dengan turut memprioritaskan 12 daerah yang menjadi target utama program *stunting*, di mana Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi salah satu di antaranya. Karena besarnya perhatian *stunting* pemerintah, tak heran, BPK-RI juga turut mengevaluasi program tersebut melalui laporan pemeriksaan. Lebih jauh, Pemerintah melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *stunting* menyinggung terkait Upaya dan strategi dalam memerangi *stunting* yang dilakukan melalui berbagai upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah dan desa.

Dalam penjelasannya, intervensi spesifik didefinisikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*. Contoh dari intervensi ini adalah pemberian makanan (yang juga memperhatikan pemenuhan asupan gizi dan nutrisi) bagi ibu hamil dari kelompok miskin, suplementasi tablet tambah darah, promosi (pengayaan dan penggalakan informasi) dan konseling menyusui, MPASI dan lain sebagainya. Sementara itu, intervensi sensitif kegiatan adalah yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*. Contoh dari tindakan ini adalah upaya pencegahan perkawinan anak dan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan, penyediaan jaminan kesehatan, penyediaan jaminan bantuan sosial, pemenuhan ketahanan pangan keluarga miskin, dan sejenisnya. Melalui definisi dan contoh tersebut, pemerintah pusat secara jelas menunjukkan keseriusan dengan melibatkan multi-sektor dan multi-pihak agar dapat bekerja secara padu melalui kebijakan yang *integrative*.

Namun demikian, komitmen pemerintah pusat jelas perlu diikuti dengan keseriusan pemerintah daerah (khususnya Sulawesi Tenggara) dalam menerapkan strategi tersebut, serta mengevaluasi kekurangan dan keterlambatan *progress* penanganan *stunting* selama ini misal, meningkatkan penerima jumlah KPS dan juga tingkat keakuratan penyalurannya menurut data IKPS yang Pemprov Sultra gagal tangani. Karenanya, juga dibutuhkan sinkronisasi program antar-pihak agar tercapai tujuan dan kebijakan yang padu, efektif, dan efisien. Untuk menggenapi Upaya ini, maka pemerintah perlu penguatan dengan belajar dari kasus pengalaman negara lain maupun inefektivitas dari kebijakan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dalam berbagai penelitian, disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi berbasis target yang menasar kelompok tertentu dapat mengurangi dan mengentaskan *stunting* (Mary: 2018). Hal ini dapat dicapai melalui pelibatan kelompok miskin dalam pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan

kebutuhan dasarnya melalui pertumbuhan produktivitas sektor tertentu (dalam hal ini, dapat berupa Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Kelautan). Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ni'mah dan Nadhiroh (2010) menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara panjang badan lahir balita, riwayat ASI eksklusif, pendapatan keluarga, pendidikan ibu dan pengetahuan gizi ibu terhadap kejadian *stunting* pada balita.

Akan tetapi, hambatan yang kini dihadapi oleh berbagai pihak yang mengemban amanat untuk memerangi *stunting* adalah hadirnya berbagai data yang berbeda, yang juga berasal dari berbagai lembaga/badan yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari penderita *stunting* yang berada pada laman Kemendagri yang menunjukkan bahwa pada tahun 2018, penderita *stunting* di Provinsi Sultra mencapai 15 persen, dan pada tahun 2021 mencapai 18,5 persen. Sementara itu, data yang dirilis oleh Kemenkes melalui Laporan IKHS menyebutkan bahwa *stunting* pada 28,7 persen, dan pada tahun 2021 mencapai 27,7 persen. Selain itu, BPS juga merilis data terakhir *stunting* pada tahun 2018 mencapai 10,1 persen.

Perbedaan data ini dapat menimbulkan kebingungan dan polemik pada jajaran yang terlibat dalam menangani kasus *stunting*, yang berpotensi mengakibatkan kekeliruan dalam alokasi sumber daya, inefisiensi pemanfaatan sumber daya dan anggaran, dan pada akhirnya pemborosan anggaran. Padahal, dibutuhkan data yang menyeluruh, padu dan sinkron sebagai landasan dasar perumusan kebijakan. Karenanya, diperlukan satu data padu dan lengkap yang terintegrasi yang mampu mengarahkan berbagai jajaran yang terlibat terkait kondisi riil di lapangan, sehingga pemangku kebijakan dapat merumuskan kebijakan program dan penganggaran secara tepat. Untuk melakukan hal ini, Kemenkes perlu mengambil *leading role*, dan jajaran kementerian/Lembaga lainnya perlu menyingkirkan ego sektoral. Mengingat, tercapainya tujuan penurunan *stunting* dapat berarti menjamin SDM Indonesia yang sehat, dan karenanya mendukung Indonesia yang lebih produktif dan sejahtera di waktu yang akan datang.